



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



Laporan Kinerja 2022



KPKNL JAKARTA IV

DAFTAR ISI

BAB I

KATA PENGANTAR - i
RINGKASAN EKSEKUTIF - iv

PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
KPKNL Jakarta IV - 1
- B. Peran Strategis
KPKNL Jakarta IV - 4
- C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan
dengan Pencapaian Kinerja - 5
- D. Sistematika Laporan - 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis - 7
- B. Penetapan Kinerja - 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi - 18
- B. Realisasi Anggaran - 28

BAB IV

PENUTUP

- A. Simpulan Umum - 29
- B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk
Tahun Mendatang - 29

Lampiran

- Kontrak Kinerja Kepala
KPKNL Jakarta IV Tahun 2022

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor ND-4448/KN.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2022.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2022. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2022 sebesar **115,05%**. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2022.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2022 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Jakarta IV,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Karman'.

Karman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2021-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta IV mempunyai fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN untuk tahun 2021-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2022.

Sasaran strategis satu yaitu sasaran strategis **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian** yang terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu: **(1)** Persentase penerimaan

negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp54.589.500.000,00 dengan persentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNPB dari Pengelolaan BMN, PNPB dari Piutang Negara dan PNPB Lelang. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi IKU tahun 2021 adalah sebesar 120%. **(2)** Persentase produktivitas lelang dengan target untuk tahun 2022 adalah sebesar 36%, pada tahun 2021 tingkat realisasi persentase produktivitas lelang adalah sebesar 120%.

Sasaran strategis dua yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**. Terdapat 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Persentase realisasi pokok lelang dengan target untuk tahun 2022 sebesar 100%, atau dengan nilai Rp500.000.000.000,00 sedangkan realisasi dari tahun 2021 sebesar 120%. **(2)** Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan target untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan nilai Rp175.000.000.000,00, pada tahun 2021, tingkat realisasi outstanding piutang negara sebesar 103,53%.

Sasaran strategis tiga yaitu **Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi** terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL. Adapun realisasi IKU tahun 2021 sebesar 4,75 (skala 5) dari target 4,74. Sedangkan target untuk tahun 2022 sebesar 4,75 (skala 5).

Sasaran strategis empat yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal** yang terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu **(1)** Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi di tahun 2021 mencapai 67,45% dengan target 62%, sedangkan target di tahun 2022 sebesar 65%. **(2)** Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan target IKU pada tahun 2022 adalah 100% atau sebanyak 69, sedangkan realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 121,43% atau sebanyak 17 bidang tanah BMN. **(3)** Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan realisasi di tahun 2021 mencapai 80,29% dari target 2248 BKPN, sedang target di tahun 2022 sebesar 100% atau dengan nilai 800 BKPN. **(4)** Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target/Realisasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebanyak 50 dan target/Realisasi Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi 360. Di tahun 2021, realisasi IKU ini adalah 100%.

Sasaran strategis lima yaitu **Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**, terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target di tahun 2022 sebesar 19%. Pada tahun 2021 realisasi sebesar 0,04% dari target sebesar 100%.

Sasaran strategis enam yaitu **Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**. Terdapat 2 (dua) IKU pada sasaran strategis ini yaitu **(1)** Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dengan target di tahun 2022 adalah sebesar 92% dari total pelaksanaan lelang. Realisasi di tahun 2021 mencapai 100% dari target sebesar 92%. **(2)** Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN dengan target di tahun 2022 sebesar 10%, IKU ini di tahun 2021 mencapai realisasi 0,02% dari target 12,5%.

Sasaran strategis tujuh yaitu **Edukasi yang Efektif**. Terdapat **1** (satu) IKU pada sasaran strategis ini yaitu tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi. Adapun realisasi IKU dimaksud untuk tahun 2021 dengan indeks sebesar 97,68 dari target 95,5 (skala 100). Sedangkan target untuk tahun 2022 dengan indeks sebesar 93 (skala 100).

Sasaran strategis delapan adalah **Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**. Pada Tahun 2022, sasaran strategis ini terdiri dari **1** (satu) IKU yaitu: **(1)** Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dengan target tahun 2022 sebesar 85%. Pada tahun 2021 realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset mencapai 88,95%.

Sasaran strategis sembilan adalah **SDM yang Kompeten**, terdapat **1** (satu) IKU yaitu Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi di tahun 2021 mencapai 116%, sedang dengan target tahun 2022 sebesar 100%.

Sasaran strategis sepuluh adalah **Organisasi yang Fit for Purpose**, terdapat 2 (dua) IKU di dalamnya yaitu: **(1)** Nilai review pengelolaan kinerja dengan realisasi di tahun 2021 mencapai 96,19, sedang target di tahun 2022 sebesar 80. **(2)** Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator dengan target tahun 2022 sebesar 90, dengan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 97,90.

Sasaran strategis sebelas adalah **Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN** yang optimal yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu: **(1)** Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 95,66% dari target 95% sedangkan target tahun 2022 sebesar 95.5%, dan **(2)** Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan target 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV pada 31 Desember 2022 adalah sebanyak 42 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	-	2	-	2
4.	DI/DII	-	2	1	-	3
5.	DIII	-	6	6	-	12
6.	DIV/Sarjana	-	-	18	-	18
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	4	3	7
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
TOTAL		0	8	31	3	42

II. Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	7	0	0	7
31-40	0	1	15	0	16
41-50	0	0	11	1	12
diatas 50	0	0	5	2	7
Jumlah	0	8	31	3	42

III. Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	6
2.	Pemeriksa	3
3.	Pranata Keuangan APBN	1
4.	Pelelang (Jabfung)	6
5.	Penilai Kekayaan Negara	5
6.	Penilai (Jabfung)	5
7.	Pejabat Lelang	5
TOTAL		31

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

d. Pelayanan Lelang

Berlakunya PMK Nomor 213/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu

putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat www.lelang.go.id. Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan survey asset yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;
4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;

5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV sebagaimana yang ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV selama tahun 2022 yang akan kami uraikan dalam Bab III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2021-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2021-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor KEP-263/WKN.07/KNL.04/2021 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2021-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;

- Melaksanakan e-rekon dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta IV dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2022 termasuk 20 IKU. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	122,17%	100%
2. Persentase produktivitas lelang	%	50,61%	36%
SASARAN STRATEGIS 2 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	166,98%	100%
2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	104%	100%

SASARAN STRATEGIS 3 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	Indeks	4,75	4,75 (skala 5)
SASARAN STRATEGIS 4 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	67,45%	65%
2. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	121,43%	100%
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	80,29%	100%
4. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS 5 PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	0,04%	19%
SASARAN STRATEGIS 6 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	%	100%	92%
2. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	%	0,02%	10%
SASARAN STRATEGIS 7 EDUKASI YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	97,68	93,00

SASARAN STRATEGIS 8 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	88,95%	85%

SASARAN STRATEGIS 9 SDM YANG KOMPETEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	116%	100%
SASARAN STRATEGIS 10 ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Nilai review pengelolaan kinerja	Indeks	96,19	80
2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	97,90	90
SASARAN STRATEGIS 11 PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022
1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	94,76%	95,5%
2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	*N/A	100%

Ket:

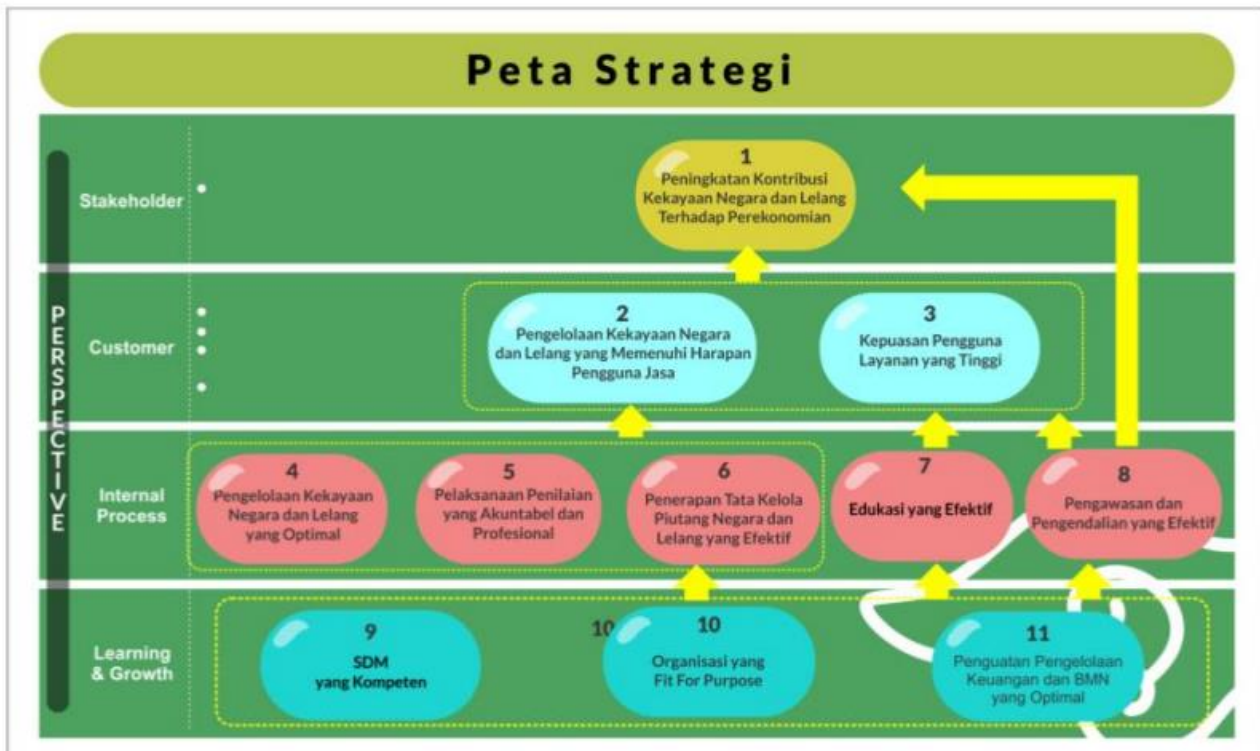
* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu

konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2022 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2022 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 11 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.

Sasaran strategis peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; dan (2) Persentase Produktivitas Lelang.

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga, penerimaan Biaya Administrasi dari pengurusan Piutang Negara dan penerimaan bea lelang ataupun hasil lelang

dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV. IKU ini pada tahun 2022 ditargetkan 100% atau sebesar Rp54.589.500.000.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan (2) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.

IKU Persentase realisasi pokok lelang dengan target sebesar Rp500.000.000.000 meliputi 2 komponen perhitungan yaitu: Target/Realisasi pokok lelang kelas I dengan target tahun 2022 sebesar Rp360.000.000.000 dan komponen lainnya yaitu target/realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp140.000.000.000,00 dengan persentase realisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang secara optimal ditujukan untuk pengembalian (*recovery*) piutang negara yang tinggi ke negara dan pelaksanaan lelang yang mendorong terjualnya barang yang dilelang dengan harga yang tinggi. Pelayanan yang optimal akan berdampak pada sisi penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang dari proses pelayanan lelang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Hasil dari pengurusan piutang negara antara lain berupa Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Adapun target IKU tahun 2022 sebesar 4,75.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terdapat 4 (empat) IKU yaitu: (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; (2) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan; (3) Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara; (4) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, identifikasi dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik, penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan, K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan, penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan, dan pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Pada tahun 2022, target bidang tanah yang disertifikatkan berjumlah 69.

Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dihitung dari jumlah BKPN yang lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan. Target BKPN Selesai pada tahun 2022 dengan persentase 100% dari target 800 BKPN.

Portofolio Aset adalah evaluasi kinerja BMN yang merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Capaian portofolio aset diperoleh dari Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya/jumlah target aset yang akan di evaluasi. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target pada tahun 2022 sebesar 100%.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran strategis pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional terdapat 1 (satu) IKU yaitu: (1) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.

Realisasi ini adalah rata-rata deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2022. Deviasi terjadi karena nilai yang digunakan dalam persetujuan lebih besar dari hasil penilaian. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target pada tahun 2022 lebih kecil dari 22%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*; dan (2) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN.

Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan target tahun 2022 sebesar 92% dari realisasi lelang tahun 2022. Sedang persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, memiliki target tahun 2022 sebesar 10%.

7. Edukasi yang Efektif

Sasaran strategis edukasi yang efektif terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- 1). edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- 2). Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Target tahun 2022 sebesar 93,00.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.

Serangkaian kegiatan untuk memantau, memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan maupun laporan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan menghasilkan output yang optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan, kendala/permasalahan yang terjadi yang kemudian dilaporkan sebagai bahan perbaikan untuk periode selanjutnya. Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu persentase tindak lanjut pengelolaan aset. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target IKU ini pada tahun 2022 sebesar 85%

9. SDM yang Kompeten

Sasaran strategis SDM yang kompeten terdapat 1 (satu) IKU yaitu: Persentase pengembangan kompetensi pegawai.

Upaya KPKNL dalam membentuk SDM dilakukan dengan tertata dan berkelanjutan sehingga menghasilkan SDM yang berkompentensi tinggi. Pegawai yang memenuhi *hard competency* ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan

kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti. Pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun pendidikan non-gelar yang meliputi diklat substansif dasar (DTSD), diklat substansif spesialisasi, *internship/on the job training*, *workshop*, bimbingan teknis, dan juga *in-house training* terkait bidang teknis. Target tahun 2022 adalah sebesar 100%.

10. Organisasi yang *Fit For Purpose*

Sasaran strategis organisasi yang *fit for purpose* terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja; (2) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

Review pengelolaan kinerja tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Seksi KI, tetapi juga meliputi dokumentasi yang terdapat pada Subbagian Umum seperti dokumentasi Resource Forum Penyusunan Pagu Indikatif, DIPA dan POK. Target tahun 2022 adalah sebesar nilai 80.

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai *feedback* peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai). Target tahun 2022 adalah sebesar nilai 90.

11. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal terdapat 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan (2) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong

organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target tahun 2022 sebesar 95,5%.

Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan memiliki target pada tahun 2022 sebesar 100%

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2022 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 115,05.

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta IV Tahun 2022 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang	1.1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	175,88%	120%
	Terhadap Perekonomian	1.2	Persentase produktivitas lelang	36%	53,71%	120%
SS 2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	181,07%	120%
		2.2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	193,33%	120%
SS 3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,75 (Skala 5)	4,77	100,42%
SS 4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81%	120%
		4.2	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	260,87%	120%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
		4.3	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	100,75%	100,75%
		4.4	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	157,00%	120%
SS 5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,04%	120%
SS 6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.1	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
		6.2	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0,00%	120%
SS 7	Edukasi yang Efektif	7.1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,00	94,66	101,78%
SS 8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8.1	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	96,74%	113,81%
SS 9	SDM yang Kompeten	9.1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
SS 10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10.1	Nilai review pengelolaan kinerja	80 (Skala 100)	99,36	120%
		10.2	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (Skala 100)	99,00	110,00%
SS 11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	97,36%	101,95%
		11.2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	174%	120%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian dengan 2 (dua) IKU, yaitu:

IKU 1.1: Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan, dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh melalui:

1. PNBP Pengelolaan BMN

- a) Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b) Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Target PNBP Aset tahun 2022 sebesar Rp36.142.000.000,00 (Tiga puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).

2. PNBP Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

Target PNBP Piutang Negara tahun 2022 sebesar Rp2.747.500.000,00 (Dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. PNBP Lelang

Penerimaan ini berasal dari pelayanan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV kepada pengguna jasa. PNBP lelang terdiri dari:

- a. bea lelang;
- b. bea lelang pegadaian;
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- d. biaya permohonan lelang;
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. pemberian izin operasional Balai Lelang;
- g. pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- h. perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II; dan
- i. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Target PNBP Lelang tahun 2022 sebesar Rp15.700.000.000,00 (Lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

**Tabel Realisasi Penerimaan Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022**

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp36.142.000.000,00	Rp43,257,230,737	119,68
b. PNBP Piutang Negara	Rp2.747.500.000,00	Rp16.964.060.028	617,36
c. PNBP Lelang	Rp15.700.000.000,00	Rp35.790.035.236	227,96
Realisasi IKU	Rp54.589.500.000	Rp96.011.326.001	175,88%

Realisasi IKU Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara tercapai 175,88% dari target yang ditetapkan.

IKU 1.2: Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi persentase produktivitas e-lelang yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 53,71% dari target yang ditetapkan sebanyak 36%, atau pencapaian target sebesar 120% dari frekuensi lelang yang dilakukan di tahun 2022. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Hasil Lelang
Per 31 Desember 2022**

Keterangan	Frekuensi Lelang	Frekuensi Lelang Laku	% Capaian
Realisasi IKU	931	500	53,71%

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 2.1: Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi persentase hasil lelang (pokok lelang) pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2022 adalah 181,07% dari target sebesar 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut.

Pokok Lelang	Target 2022	Realisasi	Capaian
PL Kelas I	Rp360.000.000.000	Rp710.388.396.425	
Pegadaian	Rp140.000.000.000	Rp194.957.785.900	
Jumlah	Rp500.000.000.000	Rp905.346.182.325	181,07%

IKU 2.2 : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Realisasi Tingkat Outstanding Piutang Negara pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2022 adalah 193,33% dari target sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Saldo PNDS	Rp175.000.000.000	Rp338.319.766.699	193,33 %

3. Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 3.1: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Realisasi survei Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2022 ditetapkan sebesar 4,77 dari target yang ditetapkan sebanyak 4,75. Pencapaian target sebesar 100,42%.

4. Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 4.1: Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Realisasi Tingkat Outstanding Piutang Negara Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada kantor pelayanan KPKNL Jakarta IV tahun 2022 adalah 81,14 % dari target sebesar 65%, dengan rician sebagai berikut.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target 2022	Realisasi
Target/Realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81,14%

IKU 4.2: Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan BMN berupa Tanah. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN.

Tujuan pemsertifikatan BMN antara lain untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah. Ruang lingkup pemsertifikatan BMN berupa tanah meliputi: tanah yang belum bersertifikat ataupun tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/lembaga.

Realisasi persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 260,87% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Terdapat target 69 bidang tanah BMN yang disertifikatkan di 2022, dan realisasi di akhir 2022 adalah sebanyak 180 bidang tanah BMN yang selesai disertifikatkan.

IKU 4.3: Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 100,75% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Pencapaian sampai 31 Desember 2022 yang tercatat adalah sejumlah 806 BKPN yang selesai diproses, dari target yang ditetapkan sebanyak 800 BKPN.

KU 4.2: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 157% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Rincian dari implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Pokok Lelang	Target 2022	Realisasi	Capaian
Target / Realisasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	50	107	157%
Target / Realisasi Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi	360	360	

5. Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 5.1: Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 0,04% dari target yang ditetapkan sebanyak 19%. Pencapaian target adalah sebesar 120%.

6. Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 6.1: Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

Realisasi pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dicapai pada tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 92%. Realisasi target dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel Realisasi Persentase Produktifitas Lelang
Per 31 Desember 2022**

Jenis Lelang	Frekuensi	Jumlah Frekuensi	%
<i>e-Auction</i>	583	583	100%
<i>e-Conventional Auction</i>	-		0%
Jumlah			100%

IKU 6.2: Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 10%. Pencapaian target sebesar 120%. Dengan rincian sebagai berikut.

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	Target 2022	Realisasi	Capaian
Deviasi Data PNBP Lelang	10%	0,00%	
Deviasi Data PNBP Piutang Negara	10%	0,00%	
Rata-Rata Target	10%	0,00%	120%

7. Sasaran Strategis 7: Edukasi yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 6.1: Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 tercapai sebesar 94,66 dari target yang ditetapkan sebesar 93 atau tercapai 101,78%.

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

IKU 8.1: Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Realisasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada tahun 2022 tercapai sebesar 96,74% dari dari target yang ditetapkan sebesar 85% Pencapaian target sebesar 113,81%.

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L	89
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	89
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021	92
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022	92
Capaian IKU	96,74%

9. Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 9.1: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2022 tercapai 120% dengan target sebesar 100%. Pencapaian 116% tersebut diperoleh dari seluruh pegawai di seksi teknis KPKNL Jakarta IV yang telah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di BPPK maupun instansi lain, yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi seksi masing-masing yang meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training, basic training* (DTSD, Semapta), Pembelajaran Jarak Jauh, *workshop*, bimbingan teknis, *sharing session*, dan juga *in-house training*. KPKNL Jakarta IV memberikan kesempatan luas terhadap seluruh pegawainya dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

10. Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit For Purpose dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 10.1: Nilai Hasil *Review* Pengelolaan Kinerja

Realisasi nilai hasil *review* pengelolaan kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 99,36 dari target yang ditetapkan sebanyak 80. Pencapaian target sebesar 120%.

IKU 10.2: Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Realisasi Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 99,00 dari target yang ditetapkan sebanyak 90. Pencapaian target sebesar 110%.

11. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

IKU 11.1: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 97,36%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 95,50% atau tercapai 101,95%.

IKU 11.2: Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2022 adalah sebesar 174%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 100% atau tercapai 120%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2022 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp1,705,065,000.00 tersebut pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1,453,644,424.00 atau sebesar 85,25% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut::

**Tabel Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja
Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2022**

No	Program	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	100
2.	Belanja Barang	1,705,065,000	1.453.644.424	85,25
3.	Belanja Modal	0	0	100
Jumlah		1,705,065,000,00	1,453,644,424,00	85,25

Pada tahun 2022 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2021. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 40\%) + (\text{SMART DJA} \times 60\%)$$

**Tabel IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2022**

No	Indikator IKPA	Bobot	Nilai	Capaian
A. Nilai IKPA				97,64%
1.	Pengelolaan UP	9,92	10	
2.	Hal III DIPA	9,15	10	
3.	Revisi DIPA	10	10	
4.	Konfirmasi Capaian Output	25	25	
5.	Realisasi	19,04	20	
6.	Dispensasi SPM	5	5	
Total		78,11	80	
B. Nilai SMART				97,17%
Capaian Tahun 2022				97,36 %

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2022 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2022 yang memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 115,05%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2022 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

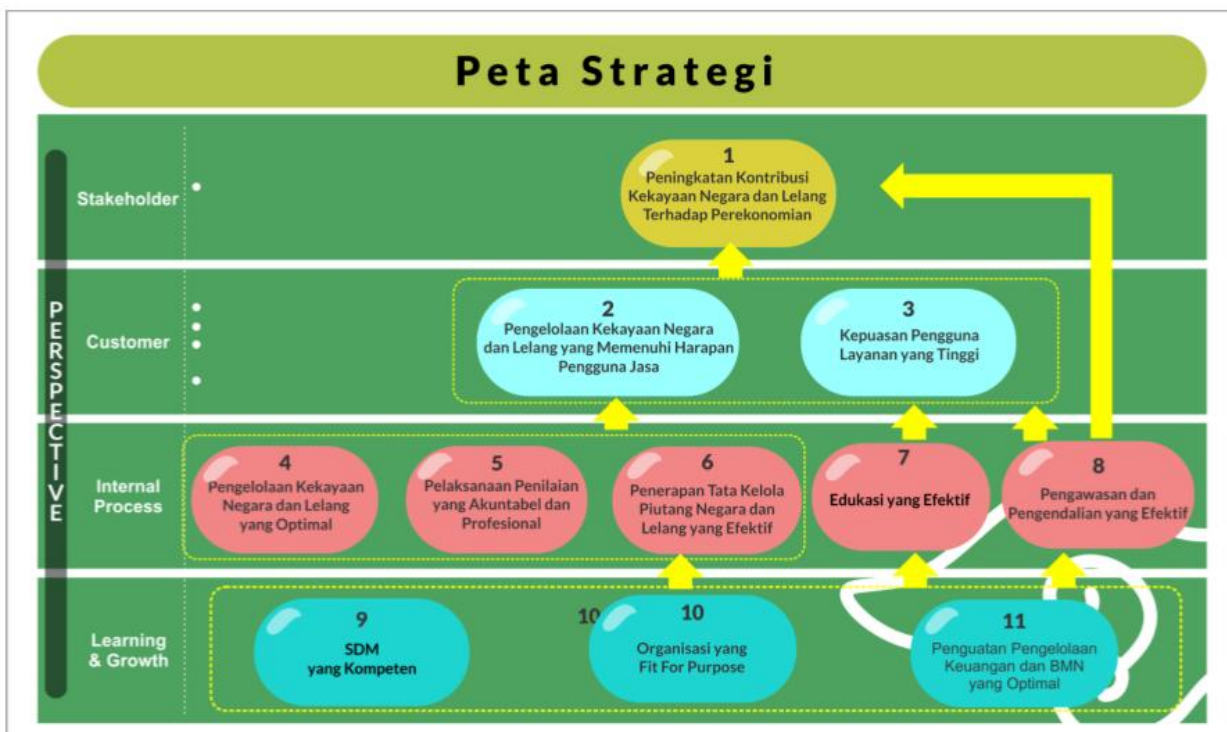


**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 10/KN.19/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
IV
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/ Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 242.823.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 4.426.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp 238.397.000,00
Dukungan Manajemen	Rp 1.429.436.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 25.220.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.397.666.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 2.800.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 3.750.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA
IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,75	4,75
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	93	93	-	93	93	93
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan Q2: Laporan Kegiatan Monitoring Q3: Laporan Kegiatan Monitoring Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Diandatangani Secara Elektronik
Karman

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Karman	NAMA	Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP	196801151991031001	NIP	196601261991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
18	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Karman
NIP 196801151991031001

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto
NIP 196601261991031001





-  [kpknljakarta4](https://www.instagram.com/kpknljakarta4)
-  [KPKNLJakartaIV](https://www.facebook.com/KPKNLJakartaIV)
-  [KPKNLJakarta4](https://twitter.com/KPKNLJakarta4)
-  [0815 8684 8888](https://wa.me/081586848888)
-  [kpknljakarta4](https://www.youtube.com/kpknljakarta4)
-  kpknljakarta4@kemenkeu.go.id
-  www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4